



**RENJA (RENCANA KERJA)**  
**BIRO PEREKONOMIAN DAN**  
**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**  
**SETDA PROVINSI NTT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2003 telah diselesaikan. Rencana Kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunya rencana kerja tahun 2023 ini diucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	.....	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Landasan Hukum	.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	4
1.4 Sistematika	.....	4
Penulisan		
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan		6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	.....	22
2.3 Isu-isu Strategis	.....	25
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>		27
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	.....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran renja SKPD	.....	27
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		33
<b>BAB V PENUTUP</b>		44

## **DAFTAR TABEL**

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Pencapaian Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunans/d Tahun 2022 Prov. NTT	10
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	29
4.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 Provinsi NTT	34

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (RENJA) Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode satu tahun yang memuat arah kebijakan, program/kegiatan dan sumber pembiayaan/pendanaan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, RENJA mempunyai peran strategis mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintahan daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen secara substantial sebagai penerjemahan dari Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA-P) Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;

2. RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan acuan untuk memasukkan usulan program/kegiatan kedalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023;
3. RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauhmana kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka tahapan penyusunan sampai dengan penetapan RENJA Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti tata cara dan alur penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya (2021) dan mengacu RKPD tahun berkenan (2023);
2. Program/kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program/kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenan (2023);
3. Program/kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program/kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan;
4. Program/kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud** penyusunan Renja ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program/kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Tahun 2023. Diharapkan melalui Rencana Kerja ini prinsip efektivitas dan efisiensi dapat berjalan dengan optimal.

Adapun **tujuan** dari penyusunan rencana kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Administrasi Pembangunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Administrasi Pembangunan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencan Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I      Pendahuluan berisikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD.
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022.
- Bab IV Penutup memuat harapan dari penyusunan Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA

#### BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Tahun 2021 melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### A. Program Penunjang Urusan Daerah

- Anggaran sebesar Rp 493.201.279,-
- Realisasi sebesar Rp 460.599.850,-
- Realisasi fisik dan capaian indikator per kegiatan :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp 19.999.000,- dan realisasi sebesar Rp 19.999.000,-.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran sebesar Rp 19.999.000 dan realisasi sebesar Rp 19.999.000,-.
  2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp 0,- realisasi sebesar Rp 0,-
    - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp 196.578.000,- realisasi sebesar Rp 186.387.770.
    - Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan realisasi sebesar Rp 39.896.280 dan realisasi sebesar Rp 39.896.080,-.
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan anggaran sebesar Rp 4.492.800,- dan realisasi sebesar Rp 4.492.800,-.

- Sub Kegiatan Penyediaan bahan Material anggaran sebesar Rp 38.291.920,- dan realisasi sebesar Rp 38.241.920,-.
  - Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran sebesar Rp 93.250.000,- dan realisasi sebesar Rp 93.177.850,-.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp 93.250.000,- dan realisasi sebesar Rp 93.177.850,- .
4. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp 4.764.000 dan realisasi sebesar Rp 4.764.000,-.
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya anggaran sebesar Rp 4.764.000 dan realisasi sebesar Rp 4.764.000,-.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp 150.411.460,- dan realisasi sebesar Rp 141.642.865,-
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp 6.507.880,- dan realisasi sebesar Rp 420.000,-
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp 16.965.000 dan realisasi sebesar Rp 15.896.485,-.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp 126.938.580 dan realisasi sebesar Rp 125.326.380,-.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp 121.448.819 dan realisasi sebesar Rp 107.806.215,-.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp 102.315.819,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 89.463.215,-.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp 19.133.000 dan realisasi sebesar Rp 18.343.000,-.

## **B. Program Perekonomian dan Pembangunan**

- Anggaran sebesar Rp 19.133.000
- Realisasi sebesar Rp 18.343.000
- Realisasi fisik dan capaian indikator per kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian anggaran sebesar Rp 380.299.900 dan realisasi sebesar Rp 332.835.780,-.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro anggaran sebesar Rp 380.299.900 dan realisasi sebesar Rp 332.835.780,-.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro anggaran sebesar Rp 246.698.100 dan realisasi sebesar Rp 222.219.700,-.
2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam anggaran sebesar Rp 334.460.650,- dan realisasi sebesar Rp 259.547.630,-.
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan anggaran sebesar Rp 254.236.660,- dan realisasi sebesar Rp 186.806.660,-.
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup anggaran sebesar Rp 22.704.800 dan realisasi sebesar Rp 21.608.600,-.
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air anggaran sebesar Rp 57.519.190 dan realisasi sebesar Rp 51.132.372,-.
3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan BUMD dan BLUD anggaran sebesar Rp 272.434.970,- dan realisasi sebesar Rp 205.016.370,-.
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha anggaran sebesar Rp 48.012.100 dan realisasi sebesar Rp 38.059.800,-.
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Air Minum, Limbah dan Sanitasi anggaran sebesar Rp 14.465.700,- dan realisasi sebesar Rp 13.245.700,-.
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD anggaran sebesar Rp 209.957.170,- dan realisasi sebesar Rp 153.710.870,-.

### **C. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**

- Anggaran sebesar Rp 221.724.850,-
- Realisasi sebesar Rp 147.204.850,-
- Realisasi fisik dan capaian indikator per kegiatan :
  1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah anggaran sebesar Rp 221.724.850,- dan realisasi sebesar Rp 147.204.850,-
    - Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD anggaran sebesar Rp 221.724.850 dan realisasi sebesar Rp 147.204.850,-.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan  
Pencapaian Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan s/d Tahun 2022  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	$10=(5+7+9)$	$11=(10/4)*100$
4.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			100%	100%	93,39%	93,39%			
4.01.0 1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				100%	100%	100%			
4.01.0 1.1.01 .06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Sertifikasi Surveilans ISO 9001-2015  Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100%					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			100%					7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4.01.0 1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	94,82%	94,82%			
4.01.0 1.1.06 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%

<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100%	100%	94,82%	94,82%			
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum untuk rapat tamu	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi konsultasi evaluasi pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%

	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,82%	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						100%			
Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengurusan perpanjangan STNK Mobil Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	3 Unit	3 Unit	100%
	Terlaksananya service rutin kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	3 Unit	3 Unit	100%
	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100%	3 Unit	3 Unit	100%
	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>						94,17%			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,17%	12 Bulan	12 Bulan	100%

4.01.0 1.1.08 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tersedianya jasa layanan internet	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,17%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.01.0 1.1.08 .04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	94,17%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Tersedianya jasa tenaga administrasi pada Biro	100%				94,17%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Tersedianya jasa tenaga pengemudi pada Biro	100%				94,17%	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>4.01.0 1.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>			100%						
4.01.0 1.1.09 .02	Sub kegiatan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pengurusan perpanjangan STNK/ pajak kendaraan dinas/operasional		100%	100%	88,76%	88,76%			
		Terlaksananya service rutinkendaraan dinas/operasional		100%						
		Terpeliharanya 3 unit kendaraan dinas/operasional Biro		100%						
		Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir								

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan		Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah secara Optimal	100%	100%	100%	100%			
4.01.06.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				100%	100%	100%	100%		
4.01.06.1.01	Sub Keg: Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR dan terlaksananya Koordinasi, Evaluasi dalam rangka Pengendalian BBM Bersubsidi di NTT Tahun 2022	5 Laporan	100%	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan		Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah secara Optimal	58%	100%	58%	58%			
4.01.06.1.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				100%	100%	100%	100%		
4.01.06.1.01	Sub Keg: Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Terlaksananya Pembentukan FK ME NTT Tingkat Provinsi dan Sosialisasi Pembentukan FK ME NTT Tingkat Kabupaten/Kota	4 Laporan	58%	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan\	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*10
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam		100%		60%	100%		100%
4.01.06.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam									
4.01.06.1.02.01	Sub Kegiatan : Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Terfasilitasinya penyusunan kebijakan terkait pengelolaan HHBK dan terlaksananya Rapat Koordinasi peningkatan pengendalian produksi dan produktifitas SDA	1 dokumen, 1 Laporan	1 laporan (50%)	1 dokumen dan 2 Rekomendasi	1 dokumen		1 dokumen 1 Laporan	1 dokumen	
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam		100%		39%	100%		100%
4.01.06.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam									
4.01.06.1.02.02	Sub Kegiatan : Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Petambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan pertambangan dan usaha pemulihan lingkungan hidup di Provinsi dan Terlaksananya koordinasi pengelolaan Konservasi di Provinsi NTT	2 Laporan	0%	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi		2 Laporan	1 laporan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan\	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*10
4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam		100%		67%	100%		100%
4.01.06.1.02	Kegiatan : Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam									
4.01.06.1.02.03	Sub Kegiatan : Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air dan Rapat Koordinasi pengembangan EBT untuk peningkatan rasio elektrifikasi NTT	2 laporan	0%	1 dokumen dan 1 Rekomendasi	2 laporan/ dokumen		1 Laporan	1 Laporan	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	100	100	100	100			
4.01.06.1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Tersedianya data dan Informasi terkait Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100	100	100	100			
4.01.06.1.03.02	Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka	Terlaksananya Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUND di Kab/Kota, terlaksananya temu solusi pengelolaan BUMD DI 3 Zona , Terlaksananya evaluasi kinerja BUMD, Terlaksananya fasilitasi penyusunan RKAP BUMD Tingkat Provinsi NTT, Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, Pembinaan dan Pemantauan BUMD Provinsi	3 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Terfasilitasinya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD							

4.01.06.1.03.02	Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Optimalisasi BUMD Air Minum	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
4.01.06.1.03.02	Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Rpat Koordinasi Optimalisasi Pengelolaan BUMD Air Minum	1 Lpaoran	100	1 Lpaoran	1 Lpaoran	100	1 Lpaoran	1 Laporan	100
4.01.06.1.03.02	Sub Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya penyusunan naskah akademik dan draft Ranperda Pendirian BUMD Pariwisata	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Terlaksananya RAPAT Evaluasi Pembinaan BUMD Provinsi	-	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
		Terlaksananya seleksi dan pelantikan direksi dan komisaris BUMD Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4.01.06.1.03	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD bdan BLUD									
4.01.06.1.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	0	0	0	0	0	0	1	1	2
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pendirian Badan Layanan Umum Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	Indikator kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2021			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022	
					Target Renja 2021	Realisasi Renja 2021	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2022	Perkiraan Tingkat capaian Realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
4.01.08	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>		efektifitas pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	0	100%	66,39%	66,39			
4.01.08. 1.01	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				100%	66,39%	66,39%			
4.01.08. 1.01.01	SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBD	terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD	Presentasi ketercapaian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD	0	4 dokumen	4 dokumen	100%	27 Dokumen	27 dokumen	100%
4.01.08. 1.01.02	SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN	terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN	Presentasi ketercapaian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBN	0	0	0	0	5 Laporan	5 Laporan	100%

4.01.08. 1.01.03	SUB KEGIATAN : : PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAB.KOTA	terlaksananya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah kab.kota	Presentasi ketercapaian pengendalian administrasi pelaksanaani pelaksanaan pembangunan Wilayah kab.kota	0	0	0	0	9 Laporan	5 Laporan	56%
4.01.08. 1.02	<b>KEGIATAN : PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				0	0	0	100%		
4.01.08. 1.02.01	SUB KEGIATAN : : ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	terlaksananya evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	presentasi kinerja administrasi	0	0	0	0	4 dokumen	2 dokumen	50%
4.01.08. 1.02.02	SUB KEGIATAN : PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terselenggaranya Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	presentase penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah	0	0	0	0	6 dokumen	4 dokumen	67%
4.01.08. 1.02.03	SUB KEGIATAN : : FASILTASI PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH	terlaksananya fasilitasi perumusan kebijakan pemabngunan daerah	presentasi pelaksanaan fasa fasilitasi perumusan kebijakan pemabngunan daerah	0	0	0	0	6 dokumen	2 dokumen	33%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termasuk didalamnya adalah Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang merupakan unsur staf dengan tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.

Sedangkan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah dibidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.
2. Penyiapan pengordinasian perumusan kebijakan dibidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Pengadministrasian Pembangunan.
3. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan Biro yang baru dibentuk dan merupakan penggabungan antara Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kinerja pelayanan pada biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat di sampaikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Perangkat Daerah**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					
	TAHUN -1 (2019)	TAHUN -2 (2020)	TAHUN -3 (2021)	TAHUN -4 (2022)	TAHUN -5 (2023)	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra OPD
	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
Terlaksananya Koordinasi TPID	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Terlaksananya Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA dan Energi	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah dan Akses permodalan KUR	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekonomi	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan
Forum Koordinasi ME NTT	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

Dari tabel 2.2 dapat di lihat bahwa indikator kinerja nomor 1 Untuk Tahun 2019 dengan jumlah target kerja sama sebanyak 53 kerja sama dan realisasinya sebanyak 82 kerja sama atau mengalami kenaikan melebihi target sebesar 154,72 %, dan untuk Tahun 2020 dengan jumlah target kerja sama sebanyak 53 kerja sama dengan realisasinya sebanyak 52 kerja sama atau mengalami kenaikan melebihi target 98,11 %. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 realisasinya menurun yang diakibatkan oleh dampak dari pandemik

covid-19. Indikator nomor 2,3,4 dan 5 rata – rata menunjukkan realisasi 100 % dengan tidak terpengaruh pada kondisi.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	2021	2022	2023	
	Misi V : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; Tujuan : Mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN; Sasarannya : Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.						
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang dihasilkan	Rekomendasi	2	2	4	6	6
2.	Jumlah rekomendasi kebijakan ekonomi mikro yang dihasilkan	Rekomendasi	3	3	6	9	9
3.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3	3
4.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3	3
5.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang energi dan air yang dihasilkan	Rekomendasi	1	1	2	3	3

6.	Persentasi jumlah BUMD jasa keuangan dan aneka usaha yang berkinerja baik	Persentasi	25%	25%	75%	100%	100%
7.	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang dihasilkan	Rekomendasi	0	5	10	15	15
8.	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BLUD yang dihasilkan	Rekomendasi	0	0	1	2	2
9.	Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Persentasi	0	33,33%	66,67%	100%	100%
10	Persentasi efektivitas penyelenggaraan administrasi pembangunan wilayah	Persentasi	0	33,33%	66,67%	100%	100%
11	Jumlah pelaporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	Laporan	0	1	2	3	3

### 2.3 Isu-Isu Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Beberapa Isu-isu Strategis Eksternal antara lain:

1. Program yang berkaitan erat, belum saling mendukung untuk pengembangan ekonomi daerah;
2. Masih terbatasnya atau belum berkembangnya peran serta pihak swasta/dunia usaha dalam mendukung kegiatan sektor Ekonomi dan Pembangunan;
3. Belum terciptanya kemitraan yang harmonis antara Dunia Usaha/Swasta;
4. Perkembangan komoditi yang belum berorientasi pasar dan masalah kualitas produksi serta kontinuitas produksi;

5. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi rakyat (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Ekonomi Daerah lainnya);
6. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap sektor permodalan.
7. Sistem pengendalian dan monev Administrasi Pembangunan yang belum memadai dan terintegrasi

Beberapa isu Strategis Internal antara lain :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung berupa : Peraturan Daerah peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam mendukung pengambilan kebijakan ekonomi daerah;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan sesuai dengan keahlian masing-masing.
3. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Koordinator dan Sub Koordinator dalam Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
4. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Tersedianya struktur organisasi dan uraian tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
6. Adanya loyalitas staf kepada pimpinan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2023 adalah:

- a. Menyusun Rencana Program dan kegiatan Tahun 2023.
- b. Menetapkan Program dan volume Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.
- c. Memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini, Biro Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menentukan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berikut dengan target kinerja dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sedangkan sasaran sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Berdasarkan tujuan misi V “**mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN**”, maka tujuan yang ingin dicapai organisasi Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2021-2023 adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik;
3. Meningkatkan tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan sasaran organisasi Biro Perekonomian Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2021-2023 adalah melakukan kegiatan:

1. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Terlaksananya koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik;
3. Terwujudnya tatakelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah dan wilayah di Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTT.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2021-2023 dengan fokus utama sebagai sasaran yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Perekonomian dan Adminsitrasi Pembangunan**  
**Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				Kondisi Pada Akhir Tahun Perencanaan
					Tahun Dasar 2019	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian	Terfasilitasi Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian secara Optimal	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Mikro	Rekomendasi	2	2	4	6	6
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro	Rekomendasi	3	3	6	9	9
		Terfasilitasi kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksannanya Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Rekomendasi	1	2	3	3	3

			Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Rekomendasi	1	1	2	3	3
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan dan perikanan	Rekomendasi	1	1	2	3	3
		Terfasilitasi Kebijakan dan koordinasi BUMD	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persentase	25%	25%	75%	100%	100%

			Terlaksana Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan sanitasi	Rekomendasi	0	5	10	15	15
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Rekomendasi	0	0	1	2	2
2	Mewujudkan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terfasilitasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya efektivitas Penyelenggaraan administrasi pembangunan daerah	Persentasi	0	33,33%	66,67%	100%	100%
		Terfasilitasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian administrasi pembangunan Wilayah	Persentasi	0	33,33%	66,67%	100%	100%

		Terfasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terfasilitasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	0	1	2	3	3
--	--	--	--	---------	---	---	---	---	---

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menentukan Program serta Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target kinerja dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
								Tolok Ukur	Target					
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
4	1		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>2,245,717,691</b>				
4	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							<b>578,591,816</b>				
4	1	1	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>58,295,490</b>				
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	53,469,900	DAU				58,295,490
					Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		7 Dokumen						
4	1	1	1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>245,194,700</b>				<b>269,713,510</b>
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	29,781,300	DAU				32,759,430
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,268,800	DAU				5,795,680
4	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	tersedianya bahan material	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	41,756,600	DAU				45,931,600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
								Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	66,500,000	DAU				73,150,000
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi,konsultasi,evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah dan luar daerah		12 Bulan	101,888,000	DAU				112,076,800
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>95,000,000</b>					<b>104,500,000</b>
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	95,000,000	DAU				104,500,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>132,802,560</b>					<b>146,082,816</b>
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,500,000	DAU				1,650,000
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa layanan internet	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	16,934,400	DAU				18,627,840
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	114,368,160	DAU				125,804,976
						tersedianya jasa kebersihan kantor		12 Bulan						
						tersedianya jasa tenaga administrasi pada		12 Bulan						

Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
								Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		Biro											
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>925,899,724</b>				<b>1,007,126,296</b>			
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>			<b>231,712,862</b>			<b>255,442,148</b>			
4	1	6	1.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tersedianya Laporan High Level Meeting TPID dan Operasi Pasar	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	101,062,000	DAU			111,726,200
						Tersedianya Laporan Rapat Teknis TPID		2 Laporan					
4	1	6	1.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Tersedianya Laporan koordinasi penyaluran KUR, Pembiayaan UMI dan Penerapan SIKP		1 Laporan	130,650,862	DAU			143,715,948
						Tersedianya Laporan Pengendalian Distribusi BBM		2 Laporan					
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1.02</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>			<b>231,712,862</b>					<b>254,884,148</b>	
4	1	6	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tersedianya Dokumen kebijakan pengelolaan HHBK dan fasilitasi pembentukan sentra HHBK unggulan		1 Dokumen	130,348,000	DAU			143,382,800
						tersedianya Laporan Monev		1 Dokumen					
						Tersedianya rekomendasi koordinasi produksi dan produktivitas SDA		1 Rekomendasi					
4	1	6	1.02	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Laporan Monev pelaksanaan kebijakan SAP Alor		1 Laporan	47,004,862	DAU			51,705,348
						Tersedianya Rekomendasi antara pemerintah dan provinsi dengan stakeholder pelaksanaan pengelolaan limbah		1 Rekomendasi					

*Renja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. NTT Tahun 2023*

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Tolok Ukur	Target				
		Tersedianya rekomendasi monev dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan limbah		1 Rekomendasi									
4	1	6	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya Laporan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab/kota dalam rangka pengembangan EBT		1 Laporan	54,360,000	DAU			59,796,000
						Tersedianya rekomendasi dalam rangka Usaha Pengembangan dan potensi Ebt di Provinsi NTT		1 Rekomendasi					
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1.03</b>		<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>				<b>462,474,000</b>			<b>496,800,000</b>	
4	1	6	1.03	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah BUMD Sehat	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 BUMD	153,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			166,000,000
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen					
							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
							Kab. Sikka, Semua						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Tolok Ukur	Target				
			Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
4	1	6	1.03	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	78,474,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			86,800,000
						Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
								Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
	Sanitasi		Kelurahan							
			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
								Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
			Kelurahan											
			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
4	1	6	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	131,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			134,000,000	
							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
								Tolak Ukur	Target					
			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
4	1	6	1.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	DAU				110,000,000
							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Manggarai Barat, Semua							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Tolok Ukur	Target				
			Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>			<b>600,472,326</b>				<b>659,999,579</b>			
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1.01</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>299,998,200</b>			<b>330,000,000</b>			
4	1	8	1.01	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		5 Laporan	99,999,700	DAU			110,000,000
4	1	8	1.01	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		4 Laporan	99,999,700	DAU			110,000,000
4	1	8	1.01	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		3 Laporan	99,998,800	DAU			110,000,000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1.02</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>300,474,126</b>					<b>329,999,579</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
4	1	8	1.02	1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	tersedianya Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah		2 Dokumen	100,474,426	DAU				109,999,800
4	1	8	1.02	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan daerah dan pembangunan wilayah		2 Laporan	99,999,900	DAU				109,999,999
4	1	8	1.02	3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	tersedianya rekomendasi kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah		2 Dokumen	99,999,800	DAU				109,999,780
<b>TOTAL</b>									<b>2,052,839,210</b>					<b>2,245,717,691</b>

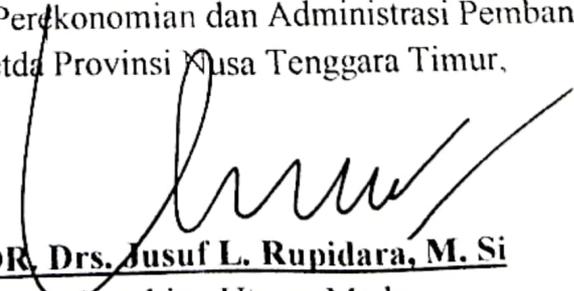
## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2023 disusun untuk memberikan fokus dan arah kebijakan dalam mengembangkan fungsi melalui kejelasan fokus dan arah dalam membangun dan mengembangkan fungsi dari 3 (tiga) Program pokok beserta 10 kegiatan yang telah dijalankan oleh 3 (tiga) Bagian dalam berbagai kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan telah menghasilkan berbagai output berupa Rekomendasi, laporan, dan naskah akademik. Selain itu menjalankan berbagai kegiatan dan fasilitasi yang menjadi tanggung jawab Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam mendukung kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Kegiatan Perekonomian Daerah meliputi Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi SDA, Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Kegiatan Administrasi Pembangunan meliputi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD dan APBN) serta Pelaporan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda tahun 2023 ini disusun sebagai bagian dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, untuk menjadi bahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran selanjutnya.

Kupang, Maret 2022

*M* Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan *f*  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
**DR. Drs. Jusuf L. Rupidara, M. Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660814 198803 1 018